

Oktober 2016

## Briefing Paper 02

# Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

September 2015-September 2016

Sekar Panuluh  
Meila Riskia Fitri

## DAFTAR ISI

---

|   |           |
|---|-----------|
| Daftar Isi  | 2         |
| Ringkasan   | 3         |
| <b>Bagian Pertama: Perkembangan Internasional</b> | <b>4</b>  |
| <b>Bagian Kedua: Perkembangan Nasional</b>        | <b>11</b> |
| <b>Bagian Ketiga: Penutup</b>                     | <b>20</b> |
| <b>Lampiran</b>                                   | <b>21</b> |

---

## Ringkasan

- Briefing paper ini mencatat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan SDGs selama satu tahun, sejak September 2015 hingga September 2016
- Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari **193** kepala Negara dan pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini.
- Peraturan Presiden tentang SDGs sedang disiapkan oleh pemerintah sebagai bukti komitmen politik sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs.
- Civil Society Organization (CSO) telah ikut serta dalam diseminasi dan berbagai kegiatan persiapan antara lain dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs.
- Sejumlah Pemerintah Daerah telah mulai melaksanakan SDGs antara lain dengan menyiapkan dukungan teknis dan regulasi. Antara lain di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pangkep serta Lampung Timur dan Wonosobo
- Selain dari CSO dan Pemerintah Daerah, inisiatif juga datang dari Perguruan Tinggi yang telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan SDGs bahkan sudah diimplementasikan dalam kegiatan belajar pembelajaran antara lain Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

## Bagian Pertama

### PERKEMBANGAN INTERNASIONAL *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

#### A. Sustainable Development Goals

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan negara

kurang berkembang—untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan *my world survey*, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. *My world survey* adalah *global survey* bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan

#### KESEPAKATAN GLOBAL DI TAHUN 2015

Tahun 2015 merupakan tahun *pembangunan berkelanjutan*, terdapat 4 kesepakatan global tentang pembangunan berkelanjutan.

**Sendai Framework** tentang penanganan kebencanaan hingga tahun 2030.

**Addis Ababa Action Agenda (AAAA)** kesepakatan untuk pembiayaan pembangunan.

**Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development** agenda pembangunan berkelanjutan global dengan 17 Tujuan dan 169 Sasaran.

**Paris Agreement** kesepakatan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling termarginalkan.

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Terdapat kesepakatan-kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat Sendai *Framework*<sup>1</sup> – merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang – yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat Addis Ababa *Action Agenda* (AAAA)<sup>2</sup> yakni kesepakatan antara Kepala Negara dan Pemerintahan, serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global.

Satu kesepakatan lagi selain *Sustainable Development Goals* adalah *Paris Agreement*<sup>3</sup>. *Paris Agreement* adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada Negara lain.

## **B. Indikator SDGs**

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document* SDGs. Diantara isi dari *outcome document* yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing-masing tujuan. Adalah *UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda* yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan *outcome document* yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun

---

<sup>1</sup> Lihat [http://www.preventionweb.net/files/43291\\_sendaiframeworkfordrren.pdf](http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf)

<sup>2</sup> Lihat [http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA\\_Outcome.pdf](http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf)

<sup>3</sup> Lihat [https://unfccc.int/files/meetings/paris\\_nov\\_2015/application/pdf/paris\\_agreement\\_english\\_.pdf](https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf)

nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk *Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators* pada bulan Maret 2015.

Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global. Adapun jumlah target dan indikator global yang disetujui untuk tiap goal dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 1. Jumlah Sasaran dan Indikator Masing-Masing Tujuan SDGs**

|                  | Goal 1 | Goal 2 | Goal 3 | Goal 4 | Goal 5 | Goal 6 | Goal 7 | Goal 8 | Goal 9 | Goal 10 | Goal 11 | Goal 12 | Goal 13 | Goal 14 | Goal 15 | Goal 16 | Goal 17 | Jumlah |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Sasaran</b>   | 7      | 8      | 13     | 10     | 9      | 8      | 5      | 12     | 8      | 10      | 10      | 11      | 5       | 10      | 12      | 12      | 19      | 169    |
| <b>Indikator</b> | 12     | 14     | 27     | 11     | 14     | 11     | 6      | 17     | 12     | 11      | 15      | 13      | 7       | 10      | 14      | 23      | 25      | 242    |

Secara keseluruhan dokumen indikator dibagi menjadi tiga kategori tier: **1) Tier I** merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara rutin dikeluarkan oleh negara; **2) Tier II** merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan data secara rutin; dan **3) Tier III**, yang merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki metodologi dan/atau standar atau masih dalam tahap penyusunan ataupun percobaan.

Meskipun telah disetujui, indikator global ini masih memungkinkan mengalami perubahan terutama dalam pembahasan metodologis pada indikator global yang berada di Tier III. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesepakatan atas definisi dan standar di tingkat internasional dalam pembahasan indikator global. Selain itu IAEG juga masih memiliki tugas untuk memberikan usulan mekanisme pelaporan kerangka indikator SDGs.

### C. High Level Political Forum

Dokumen Agenda 2030 atau SDGs bukan lahir sebagai dokumen *legally binding*, sehingga negara-negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan terhadap progres SDGs yang dilakukan di tingkat nasional, namun bukan berarti pelaksanaan SDGs lolos tanpa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan. *High Level Political Forum* (HLPF) dibentuk sebagai suatu forum terpadu yang difasilitasi oleh PBB dengan menghadirkan berbagai sector stakeholder guna saling memantau progress masing-masing negara dalam pelaksanaan SDG sebagai salah satu mekanisme monitoring, tindak lanjut dan pelaporan di tingkat global.

HLPF sendiri merupakan forum lanjutan dari *Commission Sustainable Development (CSD)* yang dibentuk setelah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di tahun 1992. Sejak 24 September 2013, HLPF meneruskan tugas CSD dalam hal menindaklanjuti agenda internasional untuk pembangunan berkelanjutan, seperti yang termasuk dalam *Rio Declaration on Environment and Development and the Agenda 21* serta *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)*.

HLPF menggunakan mekanisme *national voluntary review* yang merupakan pelaporan negara secara sukarela. Setiap tahunnya tidak semua negara yang akan melaporkan perkembangan pelaksanaan SDGs. Seperti yang terjadi pada HLPF 2016 dimana ada sekitar 22 negara yang memberikan laporan global selama 8 hari. Banyak yang menilai bahwa waktu yang disediakan tidak cukup untuk menilai progres secara mendasar untuk keseluruhan 193 negara, 17 tujuan, 169 target dan 242 indikator.

Adapun pertemuan HLPF meliputi pertemuan tahunan yaitu ministerial Meeting yang dihadiri oleh stakeholder pemerintah dan non pemerintah yang diselenggarakan dibawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Juga pertemuan empat tahunan yang merupakan pertemuan antar kepala Negara dinaungi Majelis Umum PBB.

HLPF pertama setelah SDGs disepakati yang diselenggarakan pada bulan Juli 2016 mendorong penguatan komitmen politik negara dengan disepakatinya Deklarasi Menteri. HLPF menyimpulkan bahwa dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam implementasi SDGs dengan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah maupun



non-pemerintah. HLPF juga menilai perlunya pemahaman baru untuk mereorientasikan kebutuhan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan manusia, keberlanjutan bumi, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>4</sup>

HLPF diselenggarakan pada bulan Juli di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, tahun ini mengangkat tema '*Ensuring that No One Left Behind*'. HLPF akan diselenggarakan setiap tahun untuk memastikan monitoring dan pelaporan implementasi SDGs di tingkat global. Misalnya untuk tahun 2017, HLPF dirancang dengan mengangkat tema '*Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*'.

#### **D. Dokumen-Dokumen Penting**

Sejak penandatanganan **Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development** (September 2016) telah banyak dokumen yang diterbitkan baik oleh PBB, pemerintah, maupun aktor lainnya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya:

1. Pada bulan **January 2016** Sekretaris Jenderal PBB memberikan laporan berjudul **Critical Milestone Towards Coherent, Efficient and Inclusive Follow-Up and Review at the Global Level** sebagai dokumen persiapan HLPF 2016. Laporan ini disusun melalui konsultasi dengan negara-negara anggota PBB serta memberikan catatan penting terhadap tindak lanjut dan pelaporan yang koheren, efisien dan inklusif pada level global.
2. Pada bulan **Februari 2016** *Inter-Agency Expert Group on SDGs Indicators* menyerahkan proposal **Global Indicators Framework** sebagai pertimbangan rancangan indikator global yang akan dibahas dalam *47<sup>th</sup> Session of the United Nations Statistical Commission* pada 8-11 Maret 2016 di New York.
3. **Juni 2016** Laporan Sekjen PBB tentang perkembangan pelaksanaan SDGs ini berisi tentang ringkasan situasi global yang berkaitan dengan ketujuh belas Tujuan SDGs, merelasikan dengan indikator global yang telah disahkan melalui Komisi Statistik PBB. Laporan ini merupakan sebuah langkah awal mempraktekkan pelaporan dengan indikator yang telah ada.

---

<sup>4</sup> President's summary of the High-Level Political Forum 2016, halaman 1

4. **Juli 2016 Follow-up and Review of the 2010 Agenda for Sustainable Development at the Global Level** merupakan draft resolusi yang disusun oleh Presiden Sidang Umum sebagai tindak lanjut pengadopsian SDGs. *Global Sustainable Development Report 2016* adalah sebuah publikasi PBB sebagai dokumen HLPF 2016. GSDR merupakan publikasi tahunan untuk memperkuat sinergi antara politik dan ilmu pengetahuan serta dapat menyediakan instrumen *evidence-based* yang kuat untuk mendukung pembuat kebijakan dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Komisi Statistik PBB pada bulan Juli juga mengeluarkan **The Sustainable Development Goals Report 2016** merupakan laporan yang disusun oleh Divisi Statistik PBB, dibawah Departemen Ekonomi dan dan Sosial PBB (UN DESA). Laporan pertama ini merupakan langkah awal dan dimaksudkan sebagai baseline untuk memulai implementasi berdasarkan evaluasi yang akurat mengenai kondisi dunia saat ini. Laporan ini menyajikan ringkasan ketujuh belas Tujuan menggunakan data yang telah tersedia dengan menekankan pada gaps dan tantangan yang paling signifikan.

Link unduhan dan dokumen lainnya secara lebih lengkap dalam kurun waktu September 2015 hingga Agustus 2016 terdapat pada lampiran 2.

## Bagian Kedua

### PERKEMBANGAN SDGs di INDONESIA

#### A. Partisipasi di Tingkat Nasional

SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampikkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.

Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun dari pengesahannya di tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998.

Kali ini pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum PBB untuk penandatanganan SDGs pada September 2015 lalu. Pun demikian, untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 masih banyak hal lagi yang perlu dilakukan. Seperti misalnya mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah; memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif dan *no one left behind*.

Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs global. Kelompok masyarakat sipil misalnya, yang telah bertemu dengan beberapa stakeholder kunci pemerintah untuk mendorong isu SDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal yang sama mulai dilakukan oleh stakeholder lainnya seperti sektor swasta dan bisnis serta kalangan akademisi.

## **B. Penyusunan Kerangka Hukum untuk Pelaksanaan SDGs**

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (selanjutnya dalam paper ini akan tetap disebut SDGs, red). Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu 1) menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs; 2) menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan SDGs; dan 3) menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs.

Lima belas tahun lalu, pada masa MDGs, kerangka hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Inspres ini memberikan haluan besar tentang *pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional* yang ditujukan kepada beberapa kepala kepala instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Instruksi presiden yang bersifat himbauan individual dinilai kurang cukup kuat mengikat terhadap perencanaan di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait untuk kewajiban melaksanakan MDGs serta kepala daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaian MDGs.

Sidang kabinet yang digelar pada akhir tahun 2015 lalu menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya Presiden mengintruksikan menterinya untuk segera menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Amanat ini diembankan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Staff Presiden. Proses penyusunan kerangka

hukum untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersamaan dalam proses ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs pun telah memberikan usulan Perpres dibawah koordinasi Kantor Staf Presiden.

Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya 1) **Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres; 2) **Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional**, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan 3) **Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres.

Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap stakeholder non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, stakeholder kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional.

Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat

diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha.

### **C. Inisiatif Penting dari Berbagai Pihak**

Perlu dicatat bahwa perkembangan SDGs di Indonesia sudah melaju dari tahap wacana atau diskursus. Selain di tingkat nasional sedang disiapkan Peraturan Presiden yang dapat menjadi kerangka hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia, inisiatif yang juga baik datang dari pihak lain, seperti pemerintah daerah, donor, media, masyarakat sipil dan lainnya.

#### **1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di wilayahnya. Pada bulan Maret 2016 lalu, Pemkab menyatakan bawa secara resmi Bojonegoro memulai SDGs ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto pada kegiatan yang dilaksanakan oleh World Bank, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kanada, Kedutaan Swiss, dan Uni Eropa. Bupati Suyoto sangat antusias menyambut agenda pembangunan baru ini. Dirinya bahkan telah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan rancangan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan SDGs ke depannya.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada kegiatan Diskusi Ahli "Peran Universitas dan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SDGs" yang diselenggarakan INFID pada 4 Oktober lalu, di Jakarta, Bupati Suyoto menyatakan bahwa Bojonegoro telah memiliki aturan pelaksanaan SDGs di wilayahnya.<sup>5</sup> Peraturan ini bahkan mendahului terbitnya Peraturan Presiden yang sepatutnya keluar lebih dulu. Namun ditambahkan oleh Bupati Suyoto bahwa jika Perpres keluar maka Peraturan Daerah ini akan dapat

---

<sup>5</sup> Adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/1171/KEP/412.11/2016 tentang Gugus Tugas Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) Kabupaten Bojonegoro

disesuaikan kembali dengan aturan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

## **2. Deklarasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan**

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) merupakan wilayah yang penting mendapat perhatian khusus untuk pelaksanaan SDGs karena tingkat kemiskinan sebesar 16,38% dan ini jauh melampaui kemiskinan nasional sebesar 11%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi di Sulawesi Selatan yaitu rata-rata 10% melampaui Sulsel yang hanya 7%. Sebagai wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi dan juga mengalami ketimpangan karena sebagian wilayahnya adalah kepulauan terpencil.

Dalam hal pendidikan, pada tahun 2014 penduduk yang tidak tamat SD masih tinggi yaitu 21,04% dan seperti pada umumnya wilayah lain, jumlah perempuan yang tidak tamat SD tersebut menduduki 8,53% sementara laki-laki jauh dibawahnya yaitu 3,59%. Ketimpangan gender ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya yang sangat menyolok adalah pembagian kerja yang tidak setara dalam rumah tangga, perempuan yang mengurus rumah tangga 55.912% dan laki-laki hanya 1.466%.

Data lain yang relevan dengan tujuan dan indikator SDGs adalah tingginya angka perkawinan anak dibawah 16 tahun mencapai 22,67% dan ini belum terhitung dengan perkawinan anak dibawah 18 tahun. Dalam hal sanitasi, penduduk yang mendapatkan air bersih sekitar 53,91% dan selebihnya tergantung pada air kemasan yang dari tahun ke tahun terus meningkat ketergantungannya hingga 37,69 pada tahun 2014.

Agenda SDGs dianggap mampu menjembatani berbagai permasalahan yang ada di Pangkep. Pembangunan yang inklusif dan partisipatif, terutama menyeluruh merupakan sasaran Pemda Pangkep dalam mengadopsi SDGs. Diharapkan ke depan akan terjadi pembangunan yang integratif, tidak hanya terpusat di kota melainkan juga di desa-desa. Pada 1 Juni 2016, Kabupaten Pangkep menyatakan wilayahnya berkomitmen melaksanakan SDGs dalam wujud Deklarasi, atau dikenal dengan

Deklarasi Pangkep. Deklarasi Pangkep selain ditandatangani oleh Bupati Syamsuddin Hamid, juga ditandatangani oleh Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang dan pihak-pihak lain seperti Akademisi, Kelompok Masyarakat, DPRD Kab. Pangkep, dan SKPD Kab. Pangkep.

Dalam deklarasinya, Pangkep menyatakan untuk melaksanakan SDGs melalui kemitraan yang setara dan tanpa meninggalkan seorangpun. Diantara persoalan-persoalan yang menjadi perhatian untuk diatasi adalah tentang mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

### **3. Inisiatif Universitas dalam Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs**

Pada 4 Oktober 2016, INFID menggelar Diskusi Ahli "Peran Universitas dan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SDGs". Adapun dalam diskusi yang menjadi pembicara adalah rektor dari 6 (enam) universitas dan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini keenam universitas memaparkan peran yang dapat atau sudah dilakukan, bahkan sejak sebelum SDGs lahir terhadap pencapaian SDGs. Diantaranya yaitu:

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dalam mendukung pelaksanaan SDGs, UIN Sunan Kalijaga telah menempuhnya melalui kurikulum, pembuatan pusat-pusat studi dan *dialog centre*. Cara-cara tersebut dapat menguatkan wacana SDGs yang inklusif, nondiskriminatif, damai, dan progresif lebih luas lagi. Pembangunan tersebut adalah hasil kerjasama antara berbagai elemen. Dengan kekuatan jaringan, UIN Sunan Kalijaga bisa mempengaruhi alokasi dan distribusi sumberdaya yang diperlukan untuk pencapaian SDGs. Selain itu dengan dukungan financial UIN Sunan Kalijaga juga mampu berperan dengan mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian SDGs.
- Universitas Gadjah Mada



UGM telah telah mendeklarasikan diri sebagai *Socio Entrepreneur University*. UGM telah berdiri selama 67 tahun, namun saat ini kesenjangan dan kemiskinan masih ada. Sehingga point dari Socio Entrepreneur University adalah bagaimana universitas dituntut mampu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan tidak berhenti pada produksi pengetahuan ataupun berupa *e-journal*. UGM tidak mau mengejar ranking dunia, UGM memutuskan sebagai universitas desa dengan pengabdian ke masyarakat.

- Universitas Katolik Soegijapranata

UNIKA Soegijapranata adalah sebuah universitas yang mendeklarasikan dirinya sebagai universitas transformative. UNIKA Soegijapranata berfokus di Pulau Jawa, karena terletak di Jawa dan karena kapasitasnya. Terkait dengan SDGs, UNIKA Soegijapranata berfokus pada 2 goal yaitu goal 8 dan 11. Intervensi yang bisa dilakukan adalah berupa penelitian untuk: pengembangan inovasi untuk *sustainable city*, pengembangan model pembangunan untuk *sustainable city*, pengembangan model UMKM, dan pengembangan model penguatan kualitas SDM.

- Universitas Hassanudin

Melalui pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil UNHAS bersinergi dengan SDGs. Sesuai dengan visi UNHAS untuk memperkuat dan mengangkat keunikan benua maritim, dengan mewujudkan pengabdian dan penataan, paling tidak ada 7 target SDGs yang bisa dilakukan. (goal 1, 2, 4, 6, 7, 13, dan 14). UNHAS membentuk *centre of excellent: Small Island Growth, Resilience, and Sustainability* (SIGRAS), untuk mendukung pencapaian target-target SDGs di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Indonesia.

- Universitas Negeri Sebelas Maret

UNS akan membangun Pusat Studi SDGs yang mengkoordinasikan partisipasi semua pusat studi di LPPM dan fakultas-fakultas di UNS dengan isu SDGs, serta membuka jaringan dengan PTS-PTS sekitar untuk menjadi "Jaringan SDGs UNS".

- Universitas Katolik Widya Mandira

Bentuk intervensi yang dilakukan adalah dengan mendirikan pusat kajian dan implementasi SDGs di UNWIRA, kerjasama antar PT dengan Desa Binaan, serta keterlibatan aktif dalam forum penyusunan rencana dengan Pemda.

#### **4. Kontribusi INFID**

Sejak Januari 2013 INFID turut memprakarsai dialog dan konsultasi pembangunan pasca 2015. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah cukup lama INFID terlibat dalam agenda pembangunan global ini, bahkan ikut mempersiapkan sebelum resmi disepakati pada September 2015. Konsultasi dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun usulan terhadap prioritas agenda pembangunan nasional. Juga menyumbang kontribusi keterlibatan Indonesia pada tataran global dalam perundingan penyusunan agenda pembangunan pasca 2015.

INFID juga terlibat dalam jaringan-jaringan internasional untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang bernama BEYOND 2015. Pada advokasi tingkat nasional INFID mendorong agar tujuan-tujuan yang sudah ada dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 menjadi prioritas pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya melalui dialog kebijakan dan konsultasi publik.

INFID, bersama dengan CSO lain telah melakukan advokasi terkait mainstreaming SDGs dalam perumusan RPJMN. Mainstreaming dilakukan untuk menyelaraskan 17 tujuan SDGs dalam RPJMN sehingga keduanya sejalan dan saling mendukung.

Dalam implementasi SDGs, INFID juga telah membuat buku panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dianggap sebagai yang paling dekat dengan warga tentu menjadi agen penting bagi pelaksanaan SDGs. Dengan dilaksanakannya SDGs di daerah-daerah maka pembangunan yang merata akan tercapai, terlebih dengan dasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dengan wewenang yang dimiliki dapat mengatur pelaksanaan SDGs ini di daerahnya, misalnya dengan mainstreaming SDGs dalam RPJMD. Selain itu, INFID juga telah meluncurkan buku panduan ketimpangan yang merupakan salah satu tujuan SDGs, yaitu tujuan 10.

Pada awal Oktober 2016 lalu, INFID melangsungkan Diskusi Ahli yang dihadiri oleh Rektor dari berbagai Universitas dan juga Bupati sebagai narasumber, dan Lembaga Donor dan swasta sebagai peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mempertemukan berbagai pihak agar dapat berpartisipasi dalam pencapaian SDGs. Dengan kemitraan atau kerjasama yang dibangun disini nantinya agenda-agenda bersama akan dilakukan supaya keberhasilan SDGs lebih optimal.

## Bagian Ketiga

### REFLEKSI DAN PENUTUP

Jika dibandingkan dengan kondisi 15 tahun yang lalu pada saat awal pengesahan MDGs, tentu Indonesia mengalami kemajuan yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu maupun proses yang partisipatif.

Namun meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan SDGs tidak hanya seputar dua hal itu saja. Dari segi substansi, ambisi SDGs untuk menghilangkan komponen negasi pembangunan secara tuntas merupakan suatu pekerjaan yang hampir mendekati utopia.

Dari segi proses pun, pelaksanaan SDGs di tingkat nasional masih meninggalkan PR seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan juga proses partisipasi itu sendiri. Hal ini seharusnya tidak perlu dipandang sebagai beban melainkan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Peranan aktif pemerintah tentu menjadi modal utama bagi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia. Hal lain yang penting untuk dicatat sebagai langkah baik berbagai stakeholder yakni:

- Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari 193 kepala Negara dan pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini.
- Peraturan Presiden sedang disiapkan untuk dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs.
- Organisasi Masyarakat Sipil ikut merapatkan barisan dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs.
- Pemerintah Daerah telah ikut serta memulai pelaksanaan SDG antara lain Kab Bojonegoro, dan Pangkep
- Inisiatif yang datang dari berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas membawa optimisme bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris

**LAMPIRAN 1: Kronologi SDGs****1.1 REGIONAL DAN GLOBAL****A. September 2015**

The 70<sup>th</sup> United Nations General Assembly atau Sidang Umum PBB ke-70 merupakan momentum pengesahan agenda pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan anggota PBB menandatangani dan mengadopsi *Outcome Document Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* dalam Sidang Umum yang dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam Sidang umum ini, Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia.

**B. Maret 2016**

*47<sup>th</sup> Session of the United Nations Statistical Commission* yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Maret 2016 di New York merupakan pertemuan tahunan Komisi Statistik PBB dibawah Dewan ECOSOC PBB. Agenda pertemuan kali ini adalah menyepakati indikator global SDGs.

**C. April 2016**

**The 3<sup>rd</sup> Session of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development** merupakan forum rutin yang diadalkan oleh ECOSOC PBB untuk Regional Asia-Pasific di Bangkok, Thailand. Tema forum regional kali ini adalah *Regional priorities for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific*. Pertemuan ini mencerminkan mandat dan tugas UNESCAP dalam tindak lanjut dan pelaporan di kawasan regional Asia-Pasifik.

**D. Juli 2016**

**High Level Political Forum (HLPF)** dengan tema "*Ensuring that No One is Left Behind*". dilaksanakan di New York selama 9 hari diselenggarakan oleh Dewan ECOSOC PBB. Sebanyak 22 negara memberikan *national voluntary review* tentang pelaksanaan SDGs di negaranya masing-masing. HLPF adalah sebuah platform

terpadu untuk tindak lanjut dan pelaporan pelaksanaan SDGs. HLPF menghasilkan *Ministerial Declaration* yang diharapkan dapat menyediakan kepemimpinan politik, panduan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan serta tindak lanjut SDGs hingga 2030.

## LAMPIRAN 2: Dokumen Penting

### 2.1. September 2015

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development merupakan resolusi PBB yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB dalam Sidang Umum PBB ke-70. Dokumen ini merupakan rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030 yang berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran. Dokumen dapat diunduh melalui link berikut:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)

### 2.2. January 2016

Sekretaris Jenderal PBB memberikan laporan berjudul **Critical Milestone towards Coherent, Efficient and Inclusive Follow-Up and Review at the Global Level** sebagai dokumen persiapan HLPF 2016, sebagaimana diamanatkan dalam Outcome Document SDGs. Laporan ini disusun melalui konsultasi dengan negara-negara anggota PBB dan menguraikan catatan penting terhadap tindak lanjut dan pelaporan yang koheren, efisien dan inklusif pada level global. Dokumen laporan ini dapat diunduh melalui link berikut:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E)

### 2.3. Februari 2016

*Inter-Agency Expert Group on SDGs Indicators* menyerahkan proposal **Global Indicators Framework** sebagai pertimbangan rancangan indikator global yang akan dibahas dalam *47<sup>th</sup> Session of the United Nations Statistical Commission* pada 8-11 Maret 2016 di New York. Dokumen Laporan IAEG dapat diunduh melalui link berikut:

<http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-SDGs-Rev1-E.pdf>

### 2.4. Maret 2016

Dokumen ini ialah laporan Sesi ke-47 Komisi Statistik PBB dengan pembahasan tentang indikator global SDGs. Dokumen laporan dapat diunduh melalui link:

<http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf>

## 2.5. April 2016

Masukan dari forum regional SDGs sebagai persiapan proses yang akan dilakukan dalam HLPF. Sebagaimana yang disepakati pada forum regional sebelumnya, pertemuan ini selain menjabarkan tentang peta jalan implementasi SDGs untuk kawasan regional Asia-Pasifik juga merekomendasikan penguatan pemerintah setiap negara dalam upaya implementasi SDGs.

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/3/Add.1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/3/Add.1&Lang=E)

## 2.6. Juni 2016

Laporan Sekjen PBB tentang perkembangan pelaksanaan SDGs ini berisi tentang ringkasan situasi global yang berkaitan dengan ketujuh belas Tujuan SDGs, merelasikan dengan indikator global yang telah disahkan melalui Komisi Statistik PBB. Laporan ini merupakan sebuah langkah awal mempraktekkan pelaporan dengan indikator yang telah ada. Dokumen dapat diunduh melalui link berikut:

<http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--EN.pdf>

## 2.7. Juli 2016

**A. Follow-up and Review of the 2010 Agenda for Sustainable Development at the Global Level** merupakan draft resolusi yang disusun oleh Presiden Sidang Umum sebagai tindak lanjut pengadopsian SDGs. Dokumen dapat diunduh melalui link berikut:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/70/L.60&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.60&Lang=E)

**B. *Global Sustainable Development Report 2016*** adalah sebuah publikasi PBB sebagai dokumen HLPF 2016. GSDR merupakan publikasi tahunan untuk memperkuat sinergi antara politik dan ilmu pengetahuan serta dapat menyediakan instrumen *evidence-based* yang kuat untuk mendukung pembuat kebijakan dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Dokumen GSDR 2016 dapat diunduh melalui link berikut:



[https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2328Global%20Sustainable%20development%20report%202016%20\(final\).pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2328Global%20Sustainable%20development%20report%202016%20(final).pdf)

**C. The Sustainable Development Goals Report 2016** merupakan laporan yang disusun oleh Divisi Statistik PBB, dibawah Departemen Ekonomi dan dan Sosial PBB (UN DESA). Laporan pertama ini merupakan langkah awal dan dimaksudkan sebagai baseline untuk memulai implementasi berdasarkan evaluasi yang akurat mengenai kondisi dunia saat ini. Laporan ini menyajikan ringkasan ketujuh belas Tujuan menggunakan data yang telah tersedia dengan menekankan pada gaps dan tantangan yang paling signifikan. Laporan dapat diunduh melalui link berikut:

<http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf>

Laporan Overseas Development Studies berjudul **Leaving No One Behind: A Critical Path for the First 1000 Days of the Sustainable Development Goals** merupakan sebuah laporan perkembangan yang menyajikan data tentang upaya untuk mewujudkan cita-cita SDGs *leaving no one behind* atau tidak meningkatkan satu orang pun. Dokumen dapat diunduh melalui link:

<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10692.pdf>

Pada bulan Juli 2016, Betelsamann Stiftung bekerjasama dengan Sustainable Development Solution Network (SDSN) mempublikasikan laporan penelitian global mereka yang berjudul **SDGs Index and Dashboard** yang merupakan laporan kondisi dan status terkini dari SDGs di 34 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang selanjutnya ditujukan untuk dapat membantu negara-negara tersebut untuk memulai SDGs. Dokumen dapat dilihat dan diunduh melalui link berikut:

<http://www.sdgindex.org/>